

PELATIHAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN BAGI GURU AKUNTANSI DI KOTA DAN KABUPATEN JAYAPURA

Sylvia Christina Daat, SE., M.Sc., Ak¹

sylviadaat@gmail.com

Dosen Jurusan Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

ABSTRACT

State financial reformation, which was followed by the issuance of Accrual-based Government Accounting Standards (SAP), and the Village Law that strongly influenced the teaching skill of government accounting in Indonesia. This development requires the availability of competent human resources to participate directly and actively in managing government finances so that good governance in government sector is achieved. Human Resources who are competent in managing state finances are produced from educational institutions where the teacher is one of the factors that has the most significant contribution. Therefore, in relation to the development of government accounting today, it is necessary to conduct government accounting training for accounting teachers. The implementation of Community Service activities is carried out by using lecture methods, tutorials, and discussions. Activities have been carried out properly as expected. The training activities were carried out with the number of 25 (twenty five) participants in accounting teachers in SMA and SMK in Jayapura City, Jayapura Regency, and Keerom Regency. The training was carried out with tutorial and discussion methods as much as 60% of all training and problem training / practice activities as much as 40%. Participants feel they have benefited from the activities they have carried out.

Keywords: *Government accounting, Financial management, Accounting teacher*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sektor pemerintahan semakin pesat dalam 15 tahun terakhir ini, sejalan dengan reformasi keuangan negara di Indonesia yang diawali dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Terbitnya Undang-undang tersebut menjadi titik awal penataan keuangan dan akuntansi keuangan pemerintahan. Dampak perubahan praktik tersebut kemudian memengaruhi pengajaran akuntansi pemerintahan yang lebih diarahkan pada pengajaran praktik pencatatan dan pelaporan pada instansi pemerintah. Terbitnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua yang ditetapkan dengan PP No.71 tahun 2010 semakin melengkapi dinamika perkembangan akuntansi pemerintahan, dimana sistem pencatatan akuntansi pemerintahan kemudian tidak lagi menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual seperti yang sebelumnya diatur dalam PP 24 tahun 2005, namun harus menerapkan pencatatan berbasis akrual. Selain perkembangan tersebut, berkaitan dengan pemerintahan pada tingkat desa, mulai tahun 2015 diterapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang mengatur mengenai pengelolaan pemerintahan desa. Desa diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangannya sendiri, mulai dari penyusunan anggaran, sampai dengan pertanggungjawaban keuangan dan penyusunan laporan keuangan desa. Perkembangan dalam hal pengelolaan keuangan, secara khusus akuntansi pemerintahan mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah desa, menuntut tersedianya sumber daya manusia yang kompeten untuk berpartisipasi secara langsung dan aktif dalam mengelola keuangan pemerintah sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*

governance). Wakil Menteri Keuangan Prof. Mardiasmo dalam seminar nasional “Integrasi Sistem Pendidikan dan Sertifikasi berbasis KKNI sebagai Strategi Pemenangan di Era MEA” di Jakarta menyatakan agar lembaga pendidikan menyiapkan lulusan yang memahami dan kompeten dalam bidang Akuntansi Pemerintahan, karena dana yang dikelola pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa sangat besar. Semua SDM yang merupakan faktor kunci dalam menggerakkan suatu pemerintahan disiapkan dari unit pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. SDM yang kompeten dalam pengelolaan keuangan negara dihasilkan dari lembaga pendidikan. Pada lembaga pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan, guru merupakan salah satu faktor yang memiliki kontribusi yang paling signifikan terhadap pencapaian Standar Nasional Pendidikan yang meliputi: isi, proses, penilaian, kompetensi lulusan, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Kualitas guru memiliki pengaruh berantai terhadap komponen pendidikan lainnya, sehingga peningkatan kualitas guru mutlak dilakukan secara berkelanjutan antara lain melalui sertifikasi guru, uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan, dan penilaian kinerja guru. Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan perkembangan akuntansi pemerintahan dewasa ini, perlu dilakukan pelatihan akuntansi pemerintahan bagi guru-guru akuntansi sekolah menengah atas dan kejuruan di Kota dan Kabupaten Jayapura.

1.2 Tujuan Kegiatan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan pelatihan Akuntansi Pemerintahan bagi guru-guru akuntansi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota dan Kabupaten Jayapura. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guru-guru tentang Akuntansi Pemerintahan sebagai bahan untuk mentransfer ilmu kepada para siswanya.

1.3 Manfaat Kegiatan

Kegiatan pelatihan ini diharapkan akan memberikan manfaat berikut:

1. Para peserta akan mendapatkan pengetahuan tentang akuntansi pemerintahan
2. Para peserta akan memperoleh bekal ilmu untuk diajarkan kepada siswa-siswa di sekolah menengah umum dan kejuruan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan meliputi aktivitas pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu kesatuan dan dari unit-unitnya, serta penafsiran atas hasil aktifitas ini. Subjek akuntansi pemerintahan daerah adalah institusi pemerintahan yang ada di daerah. Dalam hal ini subjek akuntansi pemerintahan daerah adalah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Objek akuntansi pemerintahan daerah adalah transaksi keuangan daerah. Anggaran daerah adalah bagian pokok dari keuangan daerah. Anggaran daerah juga bagian dari perencanaan pembangunan. Tujuan pelaporan akuntansi dan keuangan pemerintahan adalah:

1. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)

Dalam pemerintahan, keuangan Negara yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat konstitusi. Oleh sebab itu, pemerintah diharuskan menyampaikan laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Negara. Tujuan akuntansi pemerintahan adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah.

2. Manajerial

Akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi keuangan bagi pemerintah, yang diperlukan pemerintah untuk melakukan perencanaan, penganggaran, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Sistem akuntansi harus diselenggarakan dengan cara yang memungkinkan dilaksanakannya pemeriksaan oleh aparat pengawasan ekstern, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pemeriksaan.

2.2 Tujuan dan Fungsi Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Pemerintah sebagai organisasi sektor publik wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar pengambilan keputusan. Dengan adanya pelaporan keuangan pemerintah maka:

1. Memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.
2. Memberikan akuntabilitas kepada publik dan sebagai alat pengawasan dan penilaian kinerja. Dengan akuntabilitas publik ini maka masyarakat dapat menilai efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.
3. Memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang serta memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
4. Memberikan informasi kepada publik mengenai kelangsungan hidup/usaha organisasi publik dalam menyediakan barang/jasa di masa yang akan datang.
5. Menjadi alat komunikasi dan media untuk menunjukkan prestasi yang sudah dicapai oleh organisasi publik.
6. Menjadi sumber informasi bagi berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui kinerja organisasi pemerintah.

2.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan;
2. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

2.4 Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia

Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010). Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan sebagai basis perlakuan akuntansi pemerintahan di Indonesia saat ini adalah SAP berbasis akrual yang diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan LO, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan

LRA, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam anggaran Negara/daerah. Implementasi SAP berbasis akrual merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebelum diterbitkannya PP 71 Tahun 2010, basis akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia sampai dengan tahun 2014 adalah basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) atau dikenal dengan singkatan CTA. CTA merupakan basis yang unik yang dibentuk dan dikembangkan sesuai dengan kondisi di Indonesia. CTA tidak dikenal di negara lain dan merupakan basis transisi menuju akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Akuntansi pemerintahan berbasis CTA tidak mampu menghasilkan informasi seperti yang diharapkan. Pertama, laporan keuangan tidak menggambarkan pengeluaran sesungguhnya karena pengeluaran yang dicatat hanya belanja pada laporan realisasi anggaran. Beban atau biaya tidak dikenal dalam akuntansi pemerintahan berdasarkan basis CTA. Kedua, laporan keuangan berdasarkan basis CTA tidak memberikan rekam jejak atas perubahan nilai ekuitas. Hal ini terjadi karena setiap transaksi terkait aset dan kewajiban memengaruhi ekuitas. Ketiga, laporan keuangan berdasarkan basis CTA tidak menyediakan laporan yang menunjukkan kinerja operasional pemerintah. Laporan realisasi anggaran hanya menyediakan informasi tentang pelaksanaan anggaran.

2.5 Basis Akuntansi

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih (ekuitas) telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. METODE KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1 Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan pelatihan ini dilakukan di Kampus Magister Akuntansi, Universitas Cenderawasih, Jayapura.

3.2 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan pengabdian dilaksanakan selama satu minggu yaitu pada tanggal 23 sampai dengan 27 Juli 2018 dengan jadwal kegiatan:

- a. Tanggal 23 dan 24 Juli: pengantaran undangan dan pendaftaran peserta
- b. Tanggal 25 Juli: pelaksanaan kegiatan pengabdian
- c. Tanggal 26 dan 27 Juli: penyusunan laporan hasil kegiatan

3.3 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pelatihan ini adalah Guru-guru Akuntansi SMA dan SMK di Kota dan Kabupaten Jayapura.

3.4 Metoda Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metoda ceramah, tutorial, dan diskusi.

3.5 Dana Kegiatan

Dana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian yaitu:

No	Material	Volume				Biaya Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	Penggandaan Materi	160	Hal	50	Orang	250	2.000.000
2	Konsumsi Kegiatan	1	Hari	50	Orang	120.000	6.000.000
3	Spanduk Kegiatan	1	Unit	1	Paket	500.000	500.000
4	Pembuatan Laporan	1	Paket	1	Paket	500,000	500.000
5	Pelaksanaan Seminar	1	Paket	1	Paket	1.000.000	1.000.000
	TOTAL						10.000.000

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan/Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan jadwal yaitu:

No	Waktu	Materi	Fasilitator
1	08.30-09.00	Registrasi Peserta	
2	09.00-09.15	Pembukaan	Ketua Magister Akuntansi, FEB Uncen
3	09.15-10.15	Akuntansi Berbasis Akrual di Pemerintahan Daerah	Sylvia Christina Daat, SE, M.Sc, Ak
4	10.15-10.30	Snack	
5	10.30-11.30	Implementasi PP 71 pada Pemerintahan Daerah	Sylvia Christina Daat, SE, M.Sc, Ak
6	11.30-12.30	Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	Sylvia Christina Daat, SE, M.Sc, Ak
7	12.30-13.30	Ishoma	
8	13.30-14.30	Latihan Akuntansi Pemerintahan	Kurniawan Patma, SE, M.Ak
9	14.30-15.30	Latihan Akuntansi Pemerintahan	Kurniawan Patma, SE, M.Ak

Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan Pelatihan dilaksanakan dengan jumlah peserta 25 (dua puluh lima) orang guru akuntansi pada SMA dan SMK di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom. Pelatihan dilaksanakan dengan metoda tutorial dan diskusi sebanyak 60% dari seluruh kegiatan pelatihan dan latihan soal/praktik sebanyak 40%. Peserta merasa memperoleh manfaat dari kegiatan yang telah dilakukan.

5 KENDALA DAN SARAN

5.1 Kendala

Kendala yang terjadi yaitu pada penentuan tanggal kegiatan yang tertunda beberapa kali berhubung dengan kesediaan peserta. Pada umumnya tidak terdapat kendala yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

5.2 Saran

Disarankan agar pelatihan seperti ini dapat sering dilakukan bagi para guru akuntansi mengingat mereka juga perlu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terkait akuntansi pada dunia terapan. Peserta juga menyarankan agar lebih banyak dilakukan pelatihan Akuntansi Pemerintahan sehingga para guru akuntansi dapat menyusun bahan ajar dan mentransfer pengetahuan kepada siswa yang akan bekerja di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Halim, Abdul dan Muhammad S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Erlangga, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- Siregar, Baldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Lampiran Dokumentasi Kegiatan

